



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK



RENCANA KERJA (RENJA)

2021



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jalan Rahadi Oesman No. 3 Telp. (0561) 8174990 Pontianak 78111

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) merupakan rencana kerja satu tahun yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan dan tetap mengacu RPJMD Kota Pontianak 2020-2024 dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pontianak terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan OPD pelaksana. Renja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2021 berpedoman kepada RPJM Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 dan Renstra OPD yang bertujuan untuk mendukung dalam mewujudkan Visi Walikota Kota Pontianak terpilih yaitu **“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat”** dengan Misi ke 3 (tiga) yang harus dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yaitu **“Meningkatkan kualitas pelayanan yang prima kepada masyarakat oleh aparatur yang berintegritas dan sejahtera dengan dukungan teknologi informasi”**.

Demikian Rencana Kerja ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam berupaya mewujudkan visinya.

Pontianak, 2021
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Pontianak

Ir. H. URAY INDRA MULYA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610329 198903 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan.....	4
D. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	6
A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 dan Capaian Renstra OPD	6
B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	28
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	30
D. Penentuan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	33
E. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	34
F. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	50
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	51
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	51
B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika	52
BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK .	55
BAB V PENUTUP	55
LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Tahun 2020-2024	6
2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.3. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024	29
2.4. Peluang dan Tantangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	33
2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021	35
2.6. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	50
3.1. Logical Framework, Pencapaian Misi Pemerintah Kota Pontianak Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	52
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja	52
4.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tahun 2021	56

DAFTAR GAMBAR

1. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Renstra dan Renja di Berbagai Level Pemerintahan 8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dibentuk sebagai satu unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna meningkatkan kualitas aplikasi dan SDM dibidang teknologi informasi dan komunikasi melalui kerjasama dan kemitraan bersama komunitas komunikasi berbasis potensi lokal, dan meningkat Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan dan Akses Informasi, Komunikasi dan Informatika serta meningkatkan kuantitas dan kualitas data sektoral Kota Pontianak.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantu di bidang komunikasi, bidang informatika dan bidang statistik.

Bedasarkan dokumen rencana jangka menengah (RPJM) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak termasuk dalam urusan Komunikasi dan Informatika yang di fokuskan dalam mewujudkan misi yang kedua yaitu meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan prioritas pembangunan yang secara langsung memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pencapaiannya program penguasaan serta pengembangan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi.

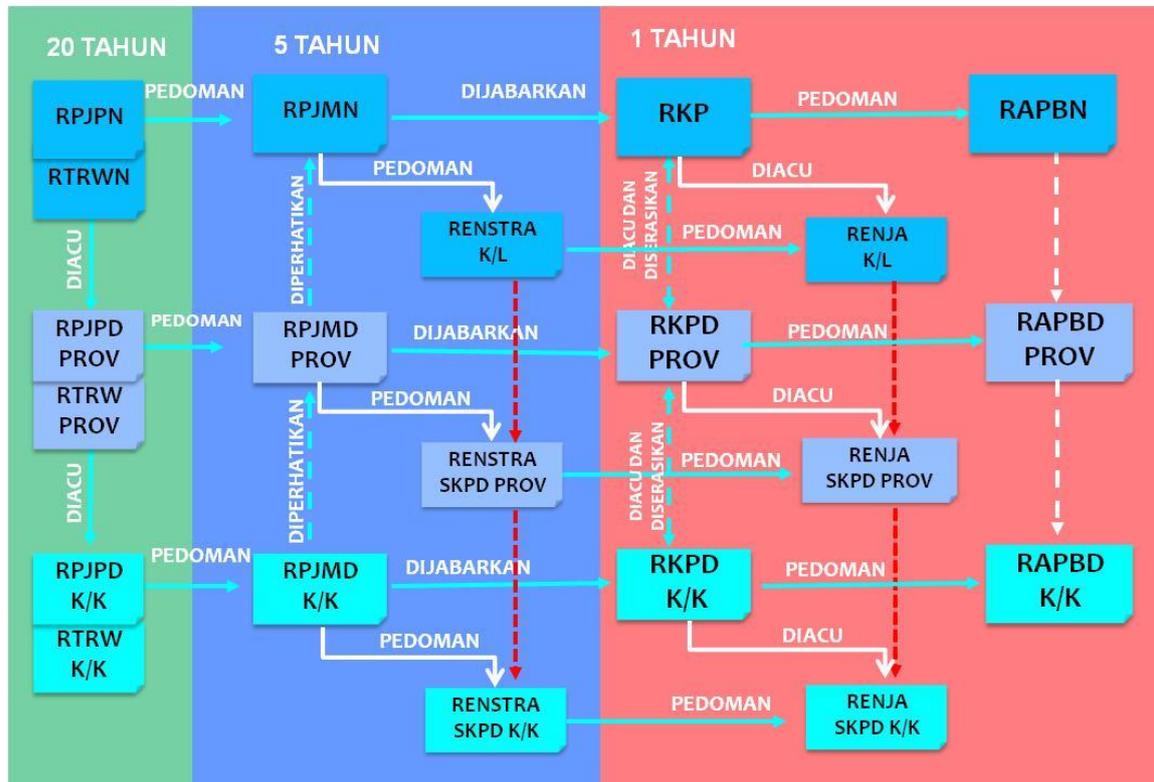
Reencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Renstra merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu satu tahun.

Rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2020 berpedoman kepada RPJM Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 dan Renstra OPD yang bertujuan untuk mendukung dalam mewujudkan Visi Walikota Kota Pontianak terpilih yaitu **“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat”** dengan Misi ke 3 (tiga) yang harus di laksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yaitu **“Meningkatkan kualitas pelayanan yang prima kepada masyarakat oleh aparatur yang berintegritas dan sejahtera dengan dukungan teknologi informasi”**.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2020 merupakan satu dokumen perencanaan yang berisikan rencana kerja tahun 2020 dalam mewujudkan visi dan misi yang ada dalam dokumen RPJMD Kota Pontianak dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2020 – 2024 yang diwujutkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 dan mengevaluasi kinerja tahun 2019.

Renja Organisasi Perangkat Ddaerah (OPD)/SKPD yang merupakan salah satu dokumen perencanaan yang harus di dimiliki oleh OPD yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020, adapun keterkaitan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dengan dokumen perencanaan yang lain “Renja SKD/OPD dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1
Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Renstra dan Renja di Berbagai Level Pemerintahan



Sumber : RPJMD Bappeda Kota Pontianak

B. Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5587);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 – 2019.
12. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 117).
14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019;
16. Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Kota Pontianak.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, tahun 2020-2024 adalah sebagai dokumen perencanaan yang berisikan program kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan yaitu tahun anggaran 2020. Dengan demikian, Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak merupakan dokumen perencanaan.

Tujuan penyusunan Rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2021 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan RKT, PPAS demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam KUA PPAS, RKPD Kota Pontianak tahun 2021 yang telah sesuai dengan potensi yang tersedia, dengan tujuan antara lain :

1. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 1 (satu) tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak untuk mengakomodir Visi, Misi, Program dan Sasaran Walikota Pontianak yang telah ditetapkan yang disinergikan dengan Visi dan Misi Organisasi.
2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021.

Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra-OPD) adalah Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD yang harus mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra-OPD dan Renja, RKT OPD, maka dokumen Renja, RKT OPD haruslah mempunyai keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra-OPD tersebut seperti isu-isu strategis, Visi, Misi, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan sasarannya sedangkan program OPD haruslah berpedoman pada rumusan program RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada Renja dan RKT OPD harus juga berpedoman pada indikasi kegiatan Renstra-OPD dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD.

Adapun manfaat Renja dalam pengelolaan organisasi perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yaitu :

1. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana perencanaan strategik akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.
2. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan tahun 2021.
3. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021.

D. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja yang dibuat untuk rentang waktu selama satu tahun ini memuat 7 (tujuh) komponen utama seperti yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dalam pasal 128 yaitu hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sistematika paling sedikit memuat terdiri dari pendahuluan, evaluasi Renja Perangkat Daerah rahun lalu, tujuan dan sasaran perangkat daerah, rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah dan penutup, sistematika renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan dokumen dalam menyusun Renja.

- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DISKOMINFO TAHUN 2019
Memuat Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisa Kinerja Pelayanan OPD, Isu – Isu Penting dalam Pelayanan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN DISKOMINFO KOTA PONTIANAK
Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah OPD, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah OPD.
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISKOMINFO KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2021.
Bab ini berisi rencana kerja dan pendanaan indikatif perangkat daerah pada Tahun Anggaran 2021.
- BAB V PENUTUP
Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja OPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 1 (satu) tahun kedepan oleh OPD.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan - kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak selama tahun 2020 dan perkiraan target tahun 2021.

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 dan Capaian Renstra OPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak terbentuk tahun 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang di tindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pontianak dan untuk teknis melengkapi kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dituangkan dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.

Dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian dapat dilihat dari realisasi pelaksanaan kinerja kegiatan dan anggaran. Realisasi kinerja kegiatan dan anggaran merupakan evaluasi dari rencana kerja tahun 2020 dan target tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak. Untuk mewujudkan dengan program dan kegiatan sebagaimana dapat tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Renstra Tahun 2020-2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Progra m dan Kegiatan (Renja Perangk at Daerah) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8=(6/7)	9	10 = 7+9	11=(10/5)	12
1	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	Persen	100%	88	85	96,59	91	88	100	
1.1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah domain pemerintah pusat dan sub domain pemerintah daerah yang dikelola dan terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah daerah	Domain / Sub Domain	175	163	163	100,00	65	114	65,14	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
1.1.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah domain / sub domain pemerintah daerah yang dikelola	domain / sub domain	175	163	163	100,00	65	114	65,14	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
1.1.2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah	Jumlah OPD yang sudah terkoneksi dengan Jaringan	OPD	25	2	2	100,00	5	7	28,00	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Progra m dan Kegiatan (Renja Perangk at Daerah) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8=(6/7)	9	10 = 7+9	11=(10/5)	12
	Daerah	Intra Pemerintah Daerah									Elektronik dan Telematika
1.2	Pengelolaan e- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah layanan publik dan administrasi yang terintegrasi	Aplikasi / Layanan Publik	8	2		0,00	2	2	25,00	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
1.2.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah pelaksanaan pengawasan e- government	kali	1	1	1	100,00	1	1	100,00	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
1.2.2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah dan Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di	OPD	30	30	30	100,00	30	30	100,00	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Progra m dan Kegiatan (Renja Perangk at Daerah) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8=(6/7)	9	10 = 7+9	11=(10/5)	12
		pusat data pemerintah									
1.2.3	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi/Sistem elektronik yang dikembangkan dan sesuai dengan peraturan	Aplikasi	13	2	2	100,00	3	5	38,46	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
1.2.4	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Aplikasi / Sistem penghubung Layanan Pemerintah	Aplikasi	1	0	0	#DIV/0!	1	0,5	50,00	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
1.2.5	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasi kan Program Kegiatan terkait pelaksanaan Smart City	OPD	30	0	0	#DIV/0!	24	12	40,00	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Progra m dan Kegiatan (Renja Perangk at Daerah) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8=(6/7)	9	10 = 7+9	11=(10/5)	12
1.2.6	Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	sistem	5	0	0	#DIV/0!	5	2,5	50,00	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
1.2.7	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi SPBE	laporan	1	0	0	#DIV/0!	1	0,5	50,00	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah	Indeks	Sangat Baik	cukup baik		#VALUE!	Cukup Baik	#VALUE!	#VALUE!	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Progra m dan Kegiatan (Renja Perangk at Daerah) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8=(6/7)	9	10 = 7+9	11=(10/5)	12
	INFORMASI										
2.1	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah area informasi yang telah diamankan dengan persandian	area	4	1	1	100,00	1	2	50,00	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
2.1.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah	dokume n	1	1	1	100,00	1	2	200,00	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
2.1.2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah sistem elektronik / sistem informasi yang telah diaudit dengan resiko rendah	sistem	32	6	6	100,00	8	14	43,75	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Progra m dan Kegiatan (Renja Perangk at Daerah) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8=(6/7)	9	10 = 7+9	11=(10/5)	12
2.1.3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah aplikasi / sistem elektronik / kegiatan strategis non elektronik / titik komunikasi yang diamankan melalui pengamanan sinyal dan menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) berdasarkan PHKS	sistem/ kegiatan	24	0	0	#DIV/0!	6	6	25,00	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
2.1.4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sertifikat elektronik yang diterbitkan untuk pengamanan informasi daerah	Sertifikat elektronik	28	4	4	100,00	7	11	39,29	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Progra m dan Kegiatan (Renja Perangk at Daerah) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8=(6/7)	9	10 = 7+9	11=(10/5)	12
2.2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan pola hubungan komunikasi sandi	OPD	15	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
2.2.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jangka waktu Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
3	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		persen	95	90	85	94	89,44	87,22	91,81	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
3.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah informasi publik pemerintah daerah yang dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat	informa si	15	12	12	100,00	12	12	80,00	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Progra m dan Kegiatan (Renja Perangk at Daerah) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8=(6/7)	9	10 = 7+9	11=(10/5)	12
3.1.1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Laporan Monitoring Opini dan Aspirasi	Dokumen	12	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
3.1.2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan strategi komunikasi	konten	15	12	12	100,00	12	12	80,00	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
3.1.3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi	kali / media	17	1	1	100,00	4	5	29,41	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
3.1.4	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah pengaduan masyarakat yang diverifikasi	pengaduan	556	480	450	93,75	480	465	83,68	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Progra m dan Kegiatan (Renja Perangk at Daerah) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8=(6/7)	9	10 = 7+9	11=(10/5)	12
3.1.5	Layanan Hubungan Media	Jumlah siaran pers yang dilakukan	kali	23	4	4	100,00	20	16	69,57	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
3.1.6	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	jumlah komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi kebijakan pemerintah	komunitas	26	1	1	100,00	6	7	26,92	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
3.1.7	Manajemen Komunikasi Krisis	jumlah dokumen laporan pengelolaan komunikasi krisis Kota Pontianak	dokumen	5	0	0	#DIV/0!	2	2	40,00	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
3.1.8	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah informasi dan dokumentasi yang disampaikan melalui media PPID	informasi	55	0	0	#DIV/0!	40	20	36,36	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Progra m dan Kegiatan (Renja Perangk at Daerah) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8=(6/7)	9	10 = 7+9	11=(10/5)	12
4	PROGRAM PENYELENGGARA AN STATISTIK SEKTORAL	Presentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik Sektoral Kota Pontianak	persen	98	88	85	96,59	90	87,5	89,29	
4.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah data statistik sektoral di Kota Pontianak yang terbaru/ terupdate	data	2000	1500	1500	100,00	1500	1500	75,00	Bidang Statistik Sektoral
4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral dan pelaksanaan Forum Data Kota Pontianak	Kali	4	2	1	50,00	4	2,5	62,50	Bidang Statistik Sektoral

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Progra m dan Kegiatan (Renja Perangk at Daerah) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8=(6/7)	9	10 = 7+9	11=(10/5)	12
4.1.2	Peningkatan Kapasitas SDM PEMDA dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah bimtek, sosialisasi dan pendampingan pengumpulan data statistik sektoral yang diselenggarakan	kali	2	0	0	#DIV/0!	2	1	50,00	Bidang Statistik Sektoral
4.1.3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Buku Metadata kegiatan statistik sektoral dan Buku Metadata Satu Data	buku	100	0	0	#DIV/0!	100	50	50,00	Bidang Statistik Sektoral
4.1.4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Buku Updating Data Statistik Sektoral, Buku Data Dinamis dan Buku Kota Pontianak Dalam Angka	buku	250	250	250	100,00	250	250	100,00	Bidang Statistik Sektoral
4.1.5	Pengembangan Infrastruktur	jumlah infrastruktur statistik sektoral	Unit	1	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00	Bidang Statistik Sektoral

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Progra m dan Kegiatan (Renja Perangk at Daerah) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8=(6/7)	9	10 = 7+9	11=(10/5)	12
		yang dikembangkan									
4.1.6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	1) Jumlah Buku Profil Daerah;	buku	175	50	50	100,00	130	90	51,43	Bidang Statistik Sektoral
		2) Jumlah Data yang sudah terintegrasi pada portal satu data Kota Pontianak;	data	2000	1.500	1500	100,00	1500	1500	75,00	
		3) Jumlah Expose Data Statistik Sektoral	dokume n	150	30	30	100,00	30	30	20,00	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	persen	100	90	88	97,78	92	90	90,00	Sekretariat
5.1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokume n	22	12	12	100,00	22	17	77,27	Sekretariat

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Progra m dan Kegiatan (Renja Perangk at Daerah) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8=(6/7)	9	10 = 7+9	11=(10/5)	12
5.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	7	6	6	100,00	7	6,5	92,86	Sekretariat
5.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA SKPD yang disusun	Sub Kegiatan	60	5	5	100,00	54	29,5	49,17	Sekretariat
5.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah sub kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	Sub Kegiatan	20	20	20	100,00	20	20	100,00	Sekretariat
5.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah kegiatan pada dokumen DPA SKPD yang disusun	Kegiatan	13	12	12	100,00	12	12	92,31	Sekretariat

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Progra m dan Kegiatan (Renja Perangk at Daerah) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8=(6/7)	9	10 = 7+9	11=(10/5)	12
5.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	Kegiatan	9	10	10	100,00	10	10	111,11	Sekretariat
5.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Laporan	5	1	1	100,00	5	3	60,00	Sekretariat
5.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	6	6	6	100,00	6	6	100,00	Sekretariat
5.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	bulan	12	12	12	100,00	12	12	100,00	Sekretariat

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Progra m dan Kegiatan (Renja Perangk at Daerah) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8=(6/7)	9	10 = 7+9	11=(10/5)	12
5.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	bulan	12	12	12	100,00	12	12	100,00	Sekretariat
5.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jangka waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	bulan	12	12	12	100,00	12	12	100,00	Sekretariat
5.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	bulan	12	12	12	100,00	12	12	100,00	Sekretariat
5.2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jangka waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD	bulan	12	0	0	#DIV/0!	12	6	50,00	Sekretariat
5.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	4	1	1	100,00	1	2	50,00	Sekretariat

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Progra m dan Kegiatan (Renja Perangk at Daerah) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8=(6/7)	9	10 = 7+9	11=(10/5)	12
5.2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	laporan	12	12	12	100,00	12	12	100,00	Sekretariat
5.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	bulan	12	0	0	#DIV/0!	12	12	100,00	Sekretariat
5.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	stel	83	0	0	#DIV/0!	81	81	97,59	Sekretariat
5.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	orang	4	0	0	#DIV/0!	4	4	100,00	Sekretariat
5.3.3	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang- undangan	kali	4	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00	Sekretariat

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Progra m dan Kegiatan (Renja Perangk at Daerah) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8=(6/7)	9	10 = 7+9	11=(10/5)	12
5.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu pelayanan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	12	12	100,00	12	12	100,00	Sekretariat
5.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bulan	12	12	12	100,00	12	12	100,00	Sekretariat
5.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	Sekretariat
5.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan	Unit	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	Sekretariat
5.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	bulan	12	0	0	#DIV/0!	12	12	100,00	Sekretariat

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Progra m dan Kegiatan (Renja Perangk at Daerah) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8=(6/7)	9	10 = 7+9	11=(10/5)	12
5.4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	12	100,00	12	12	100,00	Sekretariat
5.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	12	12	100,00	12	12	100,00	Sekretariat
5.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	bulan	12	0	-	konten	12	12	100,00	Sekretariat
5.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	50	30	30		65	95	190,00	Sekretariat
5.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	unit	1	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00	Sekretariat

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Progra m dan Kegiatan (Renja Perangk at Daerah) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8=(6/7)	9	10 = 7+9	11=(10/5)	12
5.5.2	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel	unit	63	1	1	100,00	33	34	53,97	Sekretariat
5.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	unit	48	29	29	100,00	30	29,5	61,46	Sekretariat
5.5.4	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit pengadaan aset tetap tak berwujud	unit	25	0	0	#DIV/0!	2	2	8,00	Sekretariat
5.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	bulan	12	12	12	100,00	12	12	100,00	Sekretariat
5.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	12	12	100,00	12	12	100,00	Sekretariat
5.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	bulan	12	12	12	100	12	12	100,00	Sekretariat

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Progra m dan Kegiata n (Renja Perangk at Daerah) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8=(6/7)	9	10 = 7+9	11=(10/5)	12
5.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	bulan	12	12	12	100,00	12	12	100,00	Sekretariat
5.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Unit	212	23	23	100,00	68	91	42,92	Sekretariat
5.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	unit	2	2	2	100,00	2	2	100,00	Sekretariat
5.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	203	20	20	100,00	65	85	41,87	Sekretariat

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Progra m dan Kegiata n (Renja Perangk at Daerah) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8 =(6/7)	9	10 = 7+9	11=(10/5)	12
5.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	1	1	100,00	1	1	100,00	Sekretariat

Berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2020-2024 di atas dapat kita lihat rata-rata semua program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dapat dilakukan perubahan sepanjang terjadi pemutakhiran yaitu penambahan dan penyempurnaan atas pengelompokkan, pengkodean, dan pemberian daftar penamaan atas klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur atas Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, fungsi, organisasi, sumber pendanaan, wilayah administrasi pemerintahan, dan rekening.

Pada tabel diatas dapat dilihat Target Capaian Program Renstra Tahun 2020-2024, dimana Tingkat Realisasi Capaian Program dan Kegiatan dilaksanakan pada Tahun ke-1 yakni Tahun 2020 dapat dikategorikan sangat berhasil, namun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang disebabkan adanya efisiensi anggaran untuk pengalihan dana untuk covid 19. Sedangkan untuk Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2020-2024 ada beberapa sub kegiatan memiliki prosentase tinggi hal ini dikarenakan target pada sub kegiatan tidak bisa diakumulasikan pertahun melainkan menggunakan hitungan rata-rata.

Adapun peningkatan jumlah anggaran pertahun bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah, meningkatkan kualitas aplikasi teknologi informasi dan komunikasi berbasis e-government, meningkatkan kualitas informasi pembangunan dan meningkatnya kuantitas dan kualitas data sektoral Kota Pontianak.

B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Sesuai RPJMD Kota Pontianak tahun 2020 – 2024 pada misi ke 3 (ketiga) urusan bidang komunikasi dan informasi dengan tujuan Meningkatkan kualitas pelayanan yang prima kepada masyarakat oleh aparatur yang berintegritas dan sejahtera dengan dukungan teknologi informasi.

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program yang menjadi tolok ukur pada Standar Pelayanan Minimal bidang Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kominfo di Kabupaten atau Kota, jenis pelayanan dasar SPM yang terdiri dari :

Tabel. 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis	
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020 s/d Semes ter I	Tahun 2020	Tahun 2021		
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n	Tahun n+1		

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020 s/d Semester I	Tahun 2020	Tahun 2021	
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n	Tahun n+1	
1	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	
2	jumlah komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi kebijakan pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	

Sumber : Data Olahan

Adapun pencapaian SPM untuk Semester I (Januari s/d Juni) Tahun 2020 dalam bidang Urusan Komunikasi dan Informatika dijabarkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Desiminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional yang dilaksanakan melalui :
 - Media website/media online resmi Pemerintah Kota Pontianak (www.pontianakkota.go.id) sebanyak 180 hari atau setiap hari
 - Media luar ruang yakni seperti :
 - a) Spanduk = 6 kali
 - b) Media elektronik = 4 kali
 - c) Leaflet = 1 jenis
 - d) Booklet = 2 jenis
 - e) Baliho = 25 jenis
2. Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Kegiatan ini dilakukan di 6 kecamatan di Kota Pontianak dengan melakukan survey pendataan dan pembinaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat di masing-masing 6 kecamatan.

Sedangkan untuk gambaran pelaksanaan kinerja pelayanan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam Renstra Diskominfo tahun 2020 – 2024 dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :

Tabel. 3
Target dan Realisasi
Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2020-2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan	Indeks Reformasi Birokrasi	Penerapan e-Government atau Sistem	Indeks Sistem Pemerintahan	3	3,5	3,7	4	4,5

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Reformasi Birokrasi		Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien	n Berbasis Elektronik (SPBE)					
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Pontianak	Transparansi Informasi Publik	Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber : Data Olahan

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menentukan isu strategis di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tidak terlepas dari dinamika perkembangan secara global yang berkaitan dengan dinamika internasional, nasional dan regional. Isu – isu strategis yang berkaitan dengan urusan komunikasi dan informasi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dinamika internasional globalisasi arus informasi yang memberikan dampak positif terhadap perkembangan informasi di Kota Pontianak.
2. Dinamika nasional yang berkaitan dengan strategi mengintegrasikan layanan e-government nasional yang dibawah program kerja Kementerian Kominfo RI dengan strategi sebagai berikut :
 - a. Menyusun masterplan dan memastikan penetapan proses e-government sebagai dasar penerapan pelayanan e-government.
 - b. Mendorong tercapainya index PeGI Nasional 3,4.
 - c. Integrasi database dan layanan e-government di instansi pemerintah.
3. Dinamika regional dengan sasaran isu strategi dalam pengembangan layanan informasi dan komunikasi di Kota Pontianak dengan sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Pengembangan layanan masyarakat/ASN yang dilaksanakan oleh OPD berbasis e-government.
 - b. Pengembangan Website OPD/Instansi pemerintah harus menggunakan alamat go.id.
 - c. Penyediaan oprasional pusat layanan pengaduan (Command Center) Kota Pontianak yang berbasis e-government.
 - d. Peningkatan dan pengembangan LPSE Kota Pontianak e-government.
 - e. Mendorong masyarakat memanfaatkan internet sebagai salah media informasi dan komunikasi konvensional mendukung pembangunan di Kota pontianak (e-lawar).
 - f. Penyebarluasan informasi melalui TIK namun masih dibutuhkan melalui media konvensional dan tatap muka langsung. Pengembangan Dasar Data Statistik Sektoral Kota Pontianak dengan basis atau data (one data)

Peran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam perencanaan 2020 – 2024 tidak terlepas dari pelayanan pada urusan komunikasi dan informasi yang dalam mendukung visi dan misi Kota Pontianak yang ke 3 (tiga) yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi, serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas. Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut tantangan dan peluang yang harus di hadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tidak terlepas dari tantangan dalam lingkup strategis Kota Pontianak.

Dalam **lingkup regional**, sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, kota Pontianak berkedudukan sebagai pusat pertumbuhan Wilayah Pembangunan B (WP B) yang terdiri dari Kota Pontianak dan Kabupaten Mempawah, merupakan pusat pembangunan utama di Provinsi Kalimantan Barat, dengan kegiatan utama pembangunan yang akan dikembangkan meliputi jasa pelayanan, perdagangan, pariwisata, dan agroindustri. Dalam hirarki pusat-pusat permukiman di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak berperan sebagai kota orde I, yang memiliki skala pelayanan regional dengan luas wilayah pelayanan mencakup sekitar 7.450 km².

Berdasarkan *positioning analysis* di atas dan kondisi riil yang ada saat ini, dalam kerangka lingkungan strategis dapat disimpulkan faktor-faktor yang menjadi **peluang** dan **tantangan** bagi kota Pontianak dalam pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

A. Peluang

1. Globalisasi yang tidak mengenal batas negara dan budaya memberikan peluang Kota Pontianak untuk memainkan peran di kancah internasional.
2. Terbukanya akses pasar internasional dan kerjasama antar wilayah nasional-internasional sebagai implikasi dari disepakatinya AFTA (*ASEAN Free Trade Area*).
3. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat mereduksi hambatan jarak dan meningkatkan efisiensi di berbagai bidang pembangunan.
4. Peran dan fungsi kota Pontianak yang prospektif dalam lingkup regional, nasional dan internasional.
5. Kebijakan nasional yang mendukung pengembangan kota-kota di luar Jawa khususnya Kalimantan sebagai pusat-pusat pertumbuhan yang menjadi pilar pertumbuhan ekonomi nasional.
6. Dukungan wilayah hinterland yang kuat dengan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah akan menopang pertumbuhan kota apabila dapat disinergikan dengan baik.

B. Tantangan

1. Kondisi geografis wilayah kota Pontianak dalam konstelasi yang lebih luas (berada pada muara sistem DAS Kapuas) memosisikannya sangat rentan terpengaruh perubahan wilayah hinterlandnya seperti pencemaran logam berat akibat PETI di wilayah hulu dan deforestasi di wilayah hulu menyebabkan debit air sungai Kapuas yang semakin menurun sehingga intrusi air laut semakin jauh memberikan tantangan penyediaan air baku yang berkualitas dalam proses layanan air bersih.

2. Disparitas perkembangan wilayah yang masih cukup tinggi menyebabkan Pontianak sebagai tujuan pergerakan penduduk berpotensi menimbulkan keresahan sosial.
3. Menurunnya daya dukung lingkungan dan maraknya pencemaran merupakan sebuah tantangan nyata bagi keberlangsungan/kelestarian lingkungan hidup.
4. Dominasi kawasan yang telah maju menyebabkan terjadinya monopoli orientasi kegiatan pembangunan sehingga menyebabkan perkembangan struktur wilayah yang kurang ideal.
5. Ketergantungan yang besar kepada pemerintah pusat, memberikan tantangan untuk lebih berswadaya khususnya dalam hal pembiayaan pembangunan.
6. Sentra-sentra pertumbuhan kawasan yang belum merata menyebabkan tidak terbentuknya sistem struktur pelayanan regional/wilayah yang ideal
7. Koordinasi dan komunikasi antar wilayah dan antar level pemerintahan belum terjalin dengan baik

Matrik Analisis SWOT RPJMD Kota Pontianak

FAKTOR INTERNAL	STRENGTHS	WEAKNESSES
FAKTOR EKSTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen yang tinggi dari pucuk pimpinan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. 2. Keragaman budaya, serta keunikan sebagai kota Khatulistiwa modal untuk daya tarik pariwisata 3. Lokasinya yang strategis memberikan potensi besar berkembangnya sektor-sektor perdagangan dan jasa. 4. Jumlah penduduk cukup besar dan kualitas SDM lebih baik dibandingkan wilayah hinterland-nya 5. Hubungan sosial dan akulturasi budaya masyarakat heterogen yang semakin baik menciptakan kondisi yang kondusif untuk pembangunan. 6. Partisipasi masyarakat yang semakin besar dalam kegiatan pembangunan. 7. Kewenangan semakin luas memberikan potensi untuk melakukan berbagai inovasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi geografis sangat rentan terhadap bencana banjir, intrusi air laut serta angin puting beliung. 2. Keterbatasan lahan menyebabkan harga tanah tinggi, biaya pembangunan semakin mahal. 3. Kapasitas keuangan daerah yang terbatas dan masih sangat tergantung pada pemerintah pusat 4. Sarana dan prasarana perkotaan belum ideal dan belum mampu menopang perkembangan yang terjadi 5. Pengawasan dan pengendalian program pembangunan belum optimal 6. Sebagai pusat orientasi berbagai kegiatan, menyebabkan menyebabkan kemacetan. 7. Masih terjadi kesenjangan pembangunan antar kawasan kota berpotensi menimbulkan keresahan sosial. 8. Masih ada potensi konflik dan kerawanan social antar suku, ras dan agama. 9. Jumlah penduduk miskin masih relative tinggi. 10. Tingkat pengangguran yang cukup tinggi. 11. Masih relative lemahnya penegakan hukum berdampak pada tingkat disiplin masyarakat yang rendah.
OPPORTUNITIES	STRATEGI S-O	STRATEGI W-O
<ol style="list-style-type: none"> 1. Globalisasi yang tidak mengenal batas memberikan peluang memainkan peran di kancah internasional. 2. Terbukanya akses pasar internasional dan kerjasama internasional (<i>ASEAN Free Trade Area</i>). 3. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat mereduksi hambatan jarak dan meningkatkan efisiensi. 4. Peran dan fungsi kota Pontianak yang prospektif dalam lingkup regional, nasional dan internasional. 5. Kebijakan nasional mengembangkan kota-kota Kalimantan sbagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional. 6. Dukungan wilayah hinterland dengan kekayaan SDA berlimpah menopang pertumbuhan kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi potensi dan keunikan kota bersinergi dengan pengembangan teknologi informasi untuk menyambut pasar bebas AFTA. 2. Memperkuat sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas internasional untuk mendukung fungsi pusat pertumbuhan koridor barat Kalimantan. 3. Memobilisasi potensi partisipasi aktif masyarakat sebagai sumber daya & dana penunjang pembangunan. 4. Menciptakan kelembagaan yang kuat dengan implementasi <i>good governance</i>. 5. Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan 6. Optimalisasi kerjasama antar wilayah 7. Meningkatkan daya saing dan iklim investasi daerah 8. Pengembangan ekonomi kreatif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota sektor tersier 9. Mengembangkan teknologi informasi dalam kerangka e-government guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi teknologi serta masterplan pengendalian banjir dan bencana 2. Optimalisasi lahan dengan pembangunan secara vertical 3. Optimalisasi potensi pajak sert diversifikasi pajak daerah 4. Pengembangan infrastuktur perkotaan dengan dukungan pendanaan propinsi dan pusat 5. Pemanfaatan sistem informasi dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan 6. Evaluasi dan redesign kebijakan pengembangan transportasi kota 7. penanganan masalah kesejahteraan social serta penggalan potensi sumber kesejahteraan social. 8. Pemberdayaan UKM dan koperasi untuk meningkatkan penyebaran aktivitas perekonomian daerah serta ,ciptakan lapangan kerja 9. Komitmen dan konsistensi implementasi rencana tata ruang 10. peningkatan kedisiplinan melalui penegakan aturan

Berdasarkan analisa SWOT diatas tantang dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika di Kota Pontianak dapat di uraikan berdasarkan isu strategis dalam perencanaan urusan komunikasi dan informasi yang dapat di lihat sebagai berikut :

Peluang dan Tantangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

<i>Peluang</i>	<i>Tantangan</i>
-----------------------	-------------------------

<i>Peluang</i>	<i>Tantangan</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin maju dan berkembangnya TIK. 2. Adanya berbagai ragam media informasi. 3. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi. 4. Wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang alat komunikasi meningkat. 5. Luas wilayah kota pontianak yang leratif terjangkau jaringan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajemukan tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang informasi dan komunikasi. 2. Lemahnya jaringan layanan informasi di masyarakat. 3. Masih ada beberapa daerah yang belum terjangkau layanan komunikasi. 4. Adaptasi perkembangan TIK yang masih lambat. 5. Tingginya minat masyarakat dalam penggunaan alat komunikasi.

D. Penentuan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.

Dalam menentukan isu strategis di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tidak terlepas dari dinamika perkembangan secara global yang berkaitan dengan dinamika internasional, nasional dan regional. Isu – isu strategis yang berkaitan dengan urusan komunikasi dan informasi dapat diuraikan sebagai berikut :

4. Dinamika internasional globalisasi arus informasi yang memberikan dampak positif terhadap perkembangan informasi di Kota Pontianak.
5. Dinamika nasional yang berkaitan dengan strategi mengintergrasikan layanan e-government nasional yang dibawah program kerja Kementerian Kominfo RI dengan strategi sebagai berikut :
 - d. Menyusun masterplan dan memastikan penetapan proses e-government sebagai dasar penerapan pelayanan e-government.
 - e. Mendorong tercapainya index PeGI Nasional 3,4.
 - f. Integrasi database dan layanan e-government di instansi pemerintah.
6. Dinamika regional dengan sasaran isu strategi dalam pengembangan layanan informasi dan komunikasi di Kota Pontianak dengan sasaran startegis sebagai berikut :
 - g. Pengembangan layanan masyarakat/ASN yang dilaksanakan oleh OPD berbasis e-government.
 - h. Pengembangan Website OPD/Instansi pemerintah harus menggunakan alamat go.id.
 - i. Penyediaan oprasional pusat layanan pengaduan (Command Center) Kota Pontianak yang berbasis e-government.
 - j. Peningkatan dan pengembangan LPSE Kota Pontianak e-government.
 - k. Mendorong masyarakat memanfaatkan internet sebagai salah media informasi dan komunikasi konvensional mendukung pembanguan di Kota pontianak (e-lawar).
 - l. Penyebarluasan informasi melalui TIK namun masih dibutuhkan melalui media konvensional dan tatap muka langsung.
 - m. Pengembangan Dasar Data Statistik Sektoral Kota Pontianak dengan basis atau data (one data).

E. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Rancangan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2021 tidak terlepas dari perkembangan anggaran tahun 2020, rancangan awal RKPD Diskominfo Kota Pontianak tahun 2020 dengan pagu awal Musrenbang total sebesar Rp.12.138.553.000,- dengan jumlah 75 kegiatan dan terjadi perubahan dalam Forum SKPD anggaran berkurang menjadi sebesar Rp.11.838.553.000,- dengan jumlah sebanyak 72 kegiatan, selanjutnya dalam hasil pembahasan Rencana Kerja (Renja) Diskominfo dengan Tim RKPD Kota Pontianak jumlah anggaran berubah menjadi sebesar Rp.9.020.255.729.000,- dengan jumlah 63 kegiatan. Sedangkan untuk anggaran hasil analisis kebutuhan sebesar Rp.6.362.270.408,- dari anggaran tersebut dijabarkan kedalam 50 kegiatan, terjadinya penurunan anggaran maupun kegiatan disebabkan karena terjadinya pemotongan anggaran dalam rangka refocusing akibat mewabahnya Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan prioritas Perangkat Daerah. Pembatalan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan atau yang bukan prioritas seperti perjalanan dinas merupakan kegiatan yang tidak dapat dilakukan pada kategori kegiatan bukan darurat.

Sedangkan untuk Tahun 2021 nilai yang masuk didalam RKPD sebesar Rp.5.902.400.000,- dengan jumlah kegiatan berjumlah 13 kegiatan dan 60 Sub kegiatan.

Tabel. 4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan				
NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo	Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	Persen	91	Rp. 2.533.119.550	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo	Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	91	Rp.3.561.597.590
1.1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Diskominfo	Jumlah domain pemerintah pusat dan sub domain pemerintah daerah yang dikelola dan terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah daerah	Domain / Sub Domain	65	Rp.310.498.824	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Diskominfo	Jumlah domain pemerintah pusat dan sub domain pemerintah daerah yang dikelola dan terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah daerah	65	Rp.1.195.118.627
1.1.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Diskominfo	Jumlah domain / sub domain pemerintah daerah yang dikelola	domain / sub domain	65	Rp.132.053.750	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Diskominfo	Jumlah domain / sub domain pemerintah daerah yang dikelola	65	Rp.134.531.990
1.1.2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Diskominfo	Jumlah OPD yang sudah terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	OPD	5	Rp.178.445.074	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Diskominfo	Jumlah OPD yang sudah terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5	Rp.1.060.586.637

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan				
NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Diskominfo	Jumlah layanan publik dan administrasi yang terintegrasi	Aplikasi / Layanan Publik	2	Rp.2.222.620.726	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Diskominfo	Jumlah layanan publik dan administrasi yang terintegrasi	2	Rp 2.366.478.963
1.2.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Diskominfo	Jumlah pelaksanaan pengawasan e-government	kali	1	Rp.9.600.000	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Diskominfo	Jumlah pelaksanaan pengawasan e-government	1	Rp.9.600.000
1.2.2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Diskominfo	jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah dan Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	OPD	30	Rp.1.421.554.926,40	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Diskominfo	jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah dan Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	30	Rp.1.420.653.475
1.2.3	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Diskominfo	Jumlah Aplikasi/Sistem elektronik yang dikembangkan dan sesuai dengan peraturan	Aplikasi	3	Rp.206.090.000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Diskominfo	Jumlah Aplikasi/Sistem elektronik yang dikembangkan dan sesuai dengan peraturan	3	Rp.371.080.000

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan				
NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.4	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Diskominfo	Jumlah Aplikasi / Sistem penghubung Layanan Pemerintah	Aplikasi	1	Rp.68.839.800	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Diskominfo	Jumlah Aplikasi / Sistem penghubung Layanan Pemerintah	1	Rp.68.839.800
1.2.5	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Diskominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Program Kegiatan terkait pelaksanaan Smart City	OPD	24	Rp.420.796.000	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Diskominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Program Kegiatan terkait pelaksanaan Smart City	24	Rp.400.303.350
1.2.6	Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Diskominfo	Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	sistem	5	Rp.10.000.000	Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Diskominfo	Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	5	Rp.10.000.000
1.2.7	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Diskominfo	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi SPBE	laporan	1	Rp.85.740.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Diskominfo	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi SPBE	1	Rp.86.002.338

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan				
NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Diskominfo	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah	Indeks	Cukup Baik	Rp.200.756.800	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Diskominfo	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah	Cukup Baik	Rp.252.885.480
2.1	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Diskominfo	Jumlah area informasi yang telah diamankan dengan persandian	area	1	Rp.200.756.800	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupater / Kota	Diskominfo	Jumlah area informasi yang telah diamankan dengan persandian	1	Rp.252.885.480
2.1.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah	dokumen	1	Rp.24.991.800	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Diskominfo	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah	1	Rp.24.991.800
2.1.2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	jumlah sistem elektronik / sistem informasi yang telah diaudit dengan resiko rendah	sistem	8	Rp.66.990.000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	jumlah sistem elektronik / sistem informasi yang telah diaudit dengan resiko rendah	8	Rp.66.990.000
2.1.3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan	Diskominfo	jumlah aplikasi / sistem elektronik / kegiatan strategis	sistem/ke giatan	6	Rp.98.295.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi	Diskominfo	jumlah aplikasi / sistem elektronik / kegiatan strategis	6	Rp.99.003.680

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan				
NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		non elektronik / titik komunikasi yang diamankan melalui pengamanan sinyal dan menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) berdasarkan PHKS				Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		non elektronik / titik komunikasi yang diamankan melalui pengamanan sinyal dan menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) berdasarkan PHKS		
2.1.4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Diskominfo	Jumlah Sertifikat elektronik yang diterbitkan untuk pengamanan informasi daerah	Sertifikat elektronik	7	Rp.10.480.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Diskominfo	Jumlah Sertifikat elektronik yang diterbitkan untuk pengamanan informasi daerah	7	Rp.61.900.000
2.2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan pola hubungan komunikasi sandi	OPD	0	Rp -	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan pola hubungan komunikasi sandi	0	Rp -
2.2.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jangka waktu Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	bulan	0	Rp -	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jangka waktu Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	Rp -
3	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo		persen	89,44	Rp.947.231.255	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo		89,44	Rp.1.045.675.814

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan				
NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Diskominfo	Jumlah informasi publik pemerintah daerah yang dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat	informasi	12	Rp.947.231.255	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Diskominfo	Jumlah informasi publik pemerintah daerah yang dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat	12	Rp1.045.675.814
3.1.1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Diskominfo	Jumlah Laporan Monitoring Opini dan Aspirasi	Dokumen	0	Rp -	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Diskominfo	Jumlah Laporan Monitoring Opini dan Aspirasi	0	Rp -
3.1.2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Diskominfo	Jumlah Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan strategi komunikasi	konten	12	Rp.348.508.100	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Diskominfo	Jumlah Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan strategi komunikasi	12	Rp.452.865.500
3.1.3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Diskominfo	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi	kali / media	4	Rp.118.200.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Diskominfo	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi	4	Rp.117.523.920
3.1.4	Pelayanan Informasi Publik	Diskominfo	Jumlah pengaduan masyarakat yang diverifikasi	pengaduan	480	Rp.121.660.000	Pelayanan Informasi Publik	Diskominfo	Jumlah pengaduan masyarakat yang diverifikasi	480	Rp120.189.850
3.1.5	Layanan Hubungan Media	Diskominfo	Jumlah siaran pers yang dilakukan	kali	20	Rp.131.745.000	Layanan Hubungan Media	Diskominfo	Jumlah siaran pers yang dilakukan	20	Rp.109.980.500

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan				
NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.6	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Diskominfo	jumlah komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi kebijakan pemerintah	komunitas	6	Rp.106.518.155	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Diskominfo	jumlah komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi kebijakan pemerintah	6	Rp.125.528.145
3.1.7	Manajemen Komunikasi Krisis	Diskominfo	jumlah dokumen laporan pengelolaan komunikasi krisis Kota Pontianak	dokumen	2	Rp.40.600.000	Manajemen Komunikasi Krisis	Diskominfo	jumlah dokumen laporan pengelolaan komunikasi krisis Kota Pontianak	2	Rp.40.295.999
3.1.8	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Diskominfo	Jumlah informasi dan dokumentasi yang disampaikan melalui media PPID	informasi	40	Rp.80.000.000	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Diskominfo	Jumlah informasi dan dokumentasi yang disampaikan melalui media PPID	40	Rp.79.291.900
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Diskominfo	Presentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik Sektoral Kota Pontianak	persen	90	Rp559.700.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Diskominfo	Presentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik Sektoral Kota Pontianak	90	Rp.559.708.964
4.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Diskominfo	Jumlah data statistik sektoral di Kota Pontianak yang terbaru/ terupdate	data	1500	Rp.559.700.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota	Diskominfo	Jumlah data statistik sektoral di Kota Pontianak yang terbaru/ terupdate	1500	Rp.559.708.964
4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis	Diskominfo	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan,	Kali	4	Rp.114.820.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan,	Diskominfo	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi	4	Rp.130.772.845

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan				
NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral dan pelaksanaan Forum Data Kota Pontianak				Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral dan pelaksanaan Forum Data Kota Pontianak		
4.1.2	Peningkatan Kapasitas SDM PEMDA dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Diskominfo	Jumlah bimtek, sosialisasi dan pendampingan pengumpulan data statistik sektoral yg diselenggarakan	kali	2	Rp.46.810.000	Peningkatan Kapasitas SDM PEMDA dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Diskominfo	Jumlah bimtek, sosialisasi dan pendampingan pengumpulan data statistik sektoral yg diselenggarakan	2	Rp.30.808.936
4.1.3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Diskominfo	Jumlah Buku Metadata kegiatan statistik sektoral dan Buku Metadata Satu Data	buku	100	Rp.41.810.000	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Diskominfo	Jumlah Buku Metadata kegiatan statistik sektoral dan Buku Metadata Satu Data	100	Rp.41.850.000
4.1.4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Diskominfo	Jumlah Buku Updating Data Statistik Sektoral, Buku Data Dinamis dan Buku Kota Pontianak Dalam Angka	buku	250	Rp.71.690.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Diskominfo	Jumlah Buku Updating Data Statistik Sektoral, Buku Data Dinamis dan Buku Kota Pontianak Dalam Angka	250	Rp.71.690.000
4.1.5	Pengembangan Infrastrukur	Diskominfo	jumlah infrastruktur statistik sektoral yg dikembangkan	Unit	0	Rp -	Pengembangan Infrastrukur	Diskominfo	jumlah infrastruktur statistik sektoral yg dikembangkan	0	Rp -

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.1.6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Diskominfo	1) Jumlah Buku Profil Daerah;	buku	130	Rp.284.570.000	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Diskominfo	1) Jumlah Buku Profil Daerah;	130	Rp.284.587.183	
		Diskominfo	2) Jumlah Data yang sudah terintegrasi pada portal satu data Kota Pontianak;	data	1500				Diskominfo	2) Jumlah Data yang sudah terintegrasi pada portal satu data Kota Pontianak;	1500	
		Diskominfo	3) Jumlah Expose Data Statistik Sektoral	dokumen	30				Diskominfo	3) Jumlah Expose Data Statistik Sektoral	30	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Diskominfo	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	persen	92	Rp.1.661.592.395	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Diskominfo	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	92	Rp.1.732.532.152	
5.1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	22	Rp.26.140.000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	22	Rp.28.357.091	
5.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Diskominfo	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	7	Rp.3.222.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Diskominfo	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7	Rp.7.699.010	
5.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Diskominfo	Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA SKPD yang disusun	Sub Kegiatan	54	Rp.3.222.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Diskominfo	Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA SKPD yang disusun	54	Rp.2.300.000	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan				
NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Diskominfo	Jumlah sub kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	Sub Kegiatan	20	Rp.3.222.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Diskominfo	Jumlah sub kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	20	Rp.2.300.000
5.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Diskominfo	Jumlah kegiatan pada dokumen DPA SKPD yang disusun	Kegiatan	12	Rp.3.222.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Diskominfo	Jumlah kegiatan pada dokumen DPA SKPD yang disusun	12	Rp.2.300.000
5.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Diskominfo	Jumlah kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	Kegiatan	10	Rp.3.222.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Diskominfo	Jumlah kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	10	Rp.2.300.000
5.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskominfo	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Laporan	5	Rp.5.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskominfo	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	5	Rp.5.928.230
5.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	6	Rp.4.530.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6	Rp.5.529.851
5.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskominfo	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	bulan	12	Rp.517.734.295	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskominfo	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12	Rp.528.986.748

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan				
NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Diskominfo	Jangka waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	bulan	12	Rp.304.114.295	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Diskominfo	Jangka waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	Rp.198.199.880
5.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Diskominfo	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	bulan	12	Rp.200.700.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Diskominfo	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	Rp.316.620.000
5.2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Diskominfo	Jangka waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD	bulan	12	Rp.2.040.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Diskominfo	Jangka waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Rp.3.180.000
5.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	Rp.1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Rp.1.098.967
5.2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	laporan	12	Rp.9.880.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12	Rp.9.887.901
5.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diskominfo	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	bulan	12	Rp.90.700.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diskominfo	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	Rp.80.680.000
5.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Diskominfo	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	stel	81	Rp.50.700.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Diskominfo	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	81	Rp.50.680.000

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan				
NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diskominfo	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	orang	4	Rp.40.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diskominfo	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	4	Rp.30.000.000
5.3.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Diskominfo	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	kali	0	Rp -	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Diskominfo	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	0	Rp -
5.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskominfo	Jangka waktu pelayanan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	Rp.288.946.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskominfo	Jangka waktu pelayanan administrasi umum perangkat daerah	12	Rp.285.066.429
5.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskominfo	Jangka waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bulan	12	Rp.10.056.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskominfo	Jangka waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Rp.10.137.061
5.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskominfo	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	0	Rp -	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskominfo	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0	Rp -
5.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Diskominfo	Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan	Unit	0	Rp -	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Diskominfo	Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan	0	Rp -
5.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Diskominfo	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	bulan	12	Rp.181.590.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Diskominfo	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	12	Rp.179.802.711

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan				
NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Diskominfo	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	Rp.55.100.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Diskominfo	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	Rp.41.400.657
5.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Diskominfo	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	Rp.10.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Diskominfo	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	Rp.10.200.000
5.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfo	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	bulan	12	Rp.32.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfo	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12	Rp.43.526.000
5.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskominfo	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	65	Rp.406.592.100	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskominfo	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	65	Rp.469.155.552
5.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Diskominfo	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	unit	0	Rp -	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Diskominfo	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	0	Rp -
5.5.2	Pengadaan Mebel	Diskominfo	Jumlah unit pengadaan mebel	unit	33	Rp.69.940.000	Pengadaan Mebel	Diskominfo	Jumlah unit pengadaan mebel	33	Rp.92.436.881

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan				
NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskominfo	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	unit	30	Rp.324.102.750	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskominfo	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	30	Rp.354.803.921
5.5.4	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Diskominfo	Jumlah unit pengadaan aset tetap tak berwujud	unit	2	Rp.12.549.350	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Diskominfo	Jumlah unit pengadaan aset tetap tak berwujud	2	Rp.21.914.750
5.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskominfo	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	bulan	12	Rp.234.480.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskominfo	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12	Rp.242.799.332
5.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskominfo	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	Rp.10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskominfo	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	12	Rp.12.500.000
5.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskominfo	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	bulan	12	Rp.126.720.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskominfo	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	12	Rp.135.306.600
5.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskominfo	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	bulan	12	Rp.97.760.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskominfo	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	Rp.94.992.732
5.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskominfo	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Unit	68	Rp.97.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskominfo	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	68	Rp.97.487.000

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan				
NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Diskominfo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	unit	2	Rp.39.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Diskominfo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	2	Rp.39.532.000
5.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskominfo	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	65	Rp.53.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskominfo	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	65	Rp.52.930.000
5.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Diskominfo	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	unit	1	Rp.5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Diskominfo	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	Rp.5.025.000
Jumlah						Rp.5.902.400.000	Jumlah				Rp.7.152.400.000

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Berdasarkan hasil musrenbang Kota Pontianak Tahun 2020, Dinas Komunikasi dan Informatika, tidak ada usulan dari masyarakat yang berkaitan di bidang Komunikasi dan Informatika yang diperuntukan secara khusus kepada untuk masyarakat yang mana kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi bersifat sebagai OPD pendukung. Dengan demikian, tidak ada usulan masyarakat yang diusung kembali dalam Perubahan RENJA Tahun 2021. Namun dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 ada beberapa kegiatan yang secara langsung dapat diakses masyarakat yang berkaitan dengan urusan komunikasi, informasi dan statistik dengan kegiatan Operasional Pusat Layanan Pengaduan (Pontibve Center) dengan aplikasi e-lapor dengan jenis pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah Kota Pontianak.

Tabel. 5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan
N I H I L					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005-2025, visi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak adalah "**Pontianak Kota Khatulistiwa Terdepan di Kalimantan Tahun 2025**". Visi tersebut dijabarkan ke dalam enam misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat yang Berkualitas, Berahlak Mulia, Berbudaya dan Beradab;
2. Mewujudkan Masyarakat Madani, Manusiawi, Berkurangnya Masalah Sosial, Makin Berdaya dan Terjamin Hak-Hak Warga;
3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dan Penanaman Modal untuk Kesejahteraan dan Keadilan;
4. Mewujudkan Kota Perdagangan, Jasa, Koperasi dan UKM untuk Menyerap Tenaga Kerja dan Meningkatkan Kemakmuran;
5. Mewujudkan Sarana, Prasarana, Tata Ruang dan Wilayah Perkotaan untuk Perdagangan dan Jasa yang Berwawasan Lingkungan;
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), Masyarakat yang Paham Politik dan Taat Hukum.

Visi dan misi jangka panjang tersebut didesain akan dicapai melalui empat periode pembangunan jangka menengah yang masing-masing memiliki tujuan dan arah kebijakan tersendiri. RPJM Kota Pontianak Tahun 2020-2024 sendiri merupakan periode keempat pembangunan jangka menengah dalam kerangka pembangunan jangka panjang Kota Pontianak.

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Pontianak untuk periode keempat tahun 2020 – 2024 yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah dalam bidang urusan pembangunan informasi dan komunikasi dengan meningkatkan pengembangan dan pengelolaan tata pemerintahan berbasis E-Government dan meningkatkan penguasaan serta pengembangan aplikasi dan TIK, dalam urusan bidang pembangunan persandian dengan meningkatkan penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah dan untuk urusan bidang statistic sectoral yaitu meningkatkan peningkatan kualitas pelayanan informasi public serta meningkatkan kualitas data statistik sektoral Kota Pontianak.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tidak di pisahkan dari pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan bidang informasi dan komunikasi, sebelum ditetapkan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah kinerja urusan bidang komunikasi dan informasi yang merupakan bagian dari misi Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 yaitu pada Misi ke 3 (tiga) "Meningkatkan kualitas pelayanan yang prima kepada masyarakat oleh aparatur yang berintegritas dan sejahtera dengan dukungan teknologi informasi".

Sesuai RPJMD Kota Pontianak tahun 2020 – 2024 pada misi ke 3 (tiga) urusan bidang komunikasi dan informasi dengan tujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan sasaran meningkatnya transparansi informasi penyelenggaraan pemerintahan dengan indicator kinerja sasaran sebagaimana tergambar pada tabel. 8 sebagai berikut.

Tabel. 6
Logical Framework, Pencapaian Misi Pemerintah Kota Pontianak
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak
Tahun 2020 - 2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	IKU Kota	Satuan	Tujuan	Sasaran OPD	Indikator Kinerja	Program Pendukung
Misi 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan yang kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas								
IKU Kota Pontianak					IKU Diskominfo			
1. Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi	Indek Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi Birokrasi	Indak Reformasi Biro Krasi	% (prosentase)	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1. Program Pengembangan Pengelolaan Tata Pemerintahan Berbasis E-Government
	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	2. Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	IKM Kota Pontianak	Baik	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Transparansi Informasi Publik	Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	2. Program Penguasaan Serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi 3. Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya penerapan akuntabilitas	Nilai SAKIP	2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kota Pontianak	BB	Program Rutin atau Oprasional OPD			
					Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Meningkatkan nilai kinerja OPD	Nilai kategori Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakip)	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik 2. Program Peningkatan Data Statistik Sektoral Kota Pontianak

Sumber : Data Olahan RPJMD 2020-2024

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam mengsinergikan misi RPJMD Kota Pontianak yang pada Misi ke 3 (tiga) "Meningkatkan kualitas pelayanan yang prima kepada masyarakat oleh aparatur yang berintegritas dan sejahtera dengan dukungan teknologi informasi", Tujuan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu meningkatkan transparansi informasi penyelenggaraan pemerintahan

Tabel. 7
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

Visi	Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat
Misi 3	Meningkatkan kualitas pelayanan yang kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas.

Tujuan	Sasaran OPD	Indikator Kinerja	Program Pendukung	Unit Kerja
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien	1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1 Program Pengembangan Pengelolaan Tata Pemerintahan Berbasis E-Government	TKPBET
			2 Program Penguasaan Serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	TKPBET
			3 Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	TKPBET
2. Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	2. Transparansi Informasi Publik	2. Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	4 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	IKP
			5 Program Peningkatan Data Statistik Sektorial Kota Pontianak	Statistik
Program Rutin atau Oprasional OPD				
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Meningkatkan nilai kinerja OPD	Nilai katategori Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakip)	1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretariat

Sumber : Data Olahan

Rencana Kerja program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2021, merupakan suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran. Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak telah menyusun berbagai program dalam rangka meningkatkan pelayanan di urusan informasi dan komunikasi, dimana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumber daya organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk kegiatan, yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Dalam rencana kerja program dan kegiatan yang akan di laksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2020 dapat di kelompokkan menjadi dua sasaran program dan kegiatan sebagaimana dapat di lihat pada Bab IV selanjutnya.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2021

Rencana Kerja dan pendanaan untuk anggaran dan capaian kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun anggaran 2021 yang merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMD Kota Pontianak tahun 2020-2024, rencana kerja ini upaya dalam pencapaian sasaran kinerja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang urusan Komunikasi dan informatika, bidang urusan persandian dan bidang urusan statistik.

Target anggaran Rencana Kerja Tahun 2021 menggunakan pagu dari renstra sebesar Rp.5.902.400.000 sedangkan kebutuhan yang diperlukan sebesar Rp.7.152.400.000,- sehingga terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp.1.250.000.000,- dan diharapkan dari anggaran tersebut diutamakan sub kegiatan yang prioritas. Untuk itu perlu diambil Langkah-langkah dalam menentukan sub kegiatan prioritas, antara lain :

1. Dalam menentukan sub kegiatan dan penyusun anggaran, diperlukan analisis yang sangat teliti terhadap setiap tindakan yang dilakukan.
2. Hasil yang diharapkan dari suatu rencana tertentu dapat diproyeksikan sebelum rencana tersebut dilaksanakan. hasil proyeksi ini menciptakan peluang untuk memilih rencana yang paling diperlukan untuk dilaksanakan.
3. Anggaran pada sub kegiatan merupakan penelitian untuk kerja sehingga dapat dijadikan patokan untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh
4. Anggaran memerlukan adanya dukungan dari Pengguna Anggaran, sehingga setiap PPTK kegiatan mengetahui kewenangan dan kewajibannya.
5. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian pola kerja pegawai dalam melakukan suatu kegiatan.

Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas ini dalam upaya mewujudkan capaian indikator kinerja utama dalam RPJMD Kota Pontianak tahun 2021, untuk melihat rencana program dan kegiatan prioritas di Dinas komunikasi dan informasi Kota Pontianak tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 8
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tahun 2021

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024		Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
				Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	Persen	100%	Rp.12.231.468.457	91	Rp.2.533.119.554	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
1.1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah domain pemerintah pusat dan sub domain pemerintah daerah yang dikelola dan terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah daerah	Domain / Sub Domain	175	Rp.1.268.402.132	65	Rp.310.498.824	
1.1.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah domain / sub domain pemerintah daerah yang dikelola	domain / sub domain	175	Rp.524.485.156	65	Rp.132.053.750	
1.1.2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang sudah terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	OPD	25	Rp.743.916.976	5	Rp.178.445.074	
1.2	Pengelolaan e- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah layanan publik dan administrasi yang terintegrasi	Aplikasi / Layanan Publik	8	Rp.10.963.066.325	2	Rp.2.222.620.726	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024		Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
				Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	
1.2.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah pelaksanaan pengawasan e-government	kali	1	Rp.49.872.992	1	Rp.9.600.000	
1.2.2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah dan Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	OPD	30	Rp.7.573.887.439	30	Rp.1.421.554.926,40	
1.2.3	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi/Sistem elektronik yang dikembangkan dan sesuai dengan peraturan	Aplikasi	13	Rp.974.336.384	3	Rp.206.090.000	
1.2.4	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Aplikasi / Sistem penghubung Layanan Pemerintah	Aplikasi	1	Rp.277.947.578	1	Rp.68.839.800	
1.2.5	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Program Kegiatan terkait pelaksanaan Smart City	OPD	30	Rp.1.661.250.255	24	Rp.420.796.000	
1.2.6	Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	sistem	5	Rp.44.648.950	5	Rp.10.000.000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024		Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
				Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	
1.2.7	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi SPBE	laporan	1	Rp.381.122.727	1	Rp.85.740.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah	Indeks	Sangat Baik	Rp.886.282.590	Cukup Baik	Rp.200.756.800	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
2.1	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah area informasi yang telah diamankan dengan persandian	area	4	Rp.853.283.590	1	Rp.200.756.800	
2.1.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah	dokumen	1	Rp.115.278.240	1	Rp.24.991.800	
2.1.2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sistem elektronik / sistem informasi yang telah diaudit dengan resiko rendah	sistem	32	Rp.293.499.500	8	Rp.66.990.000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024		Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
				Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	
2.1.3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah aplikasi / sistem elektronik / kegiatan strategis non elektronik / titik komunikasi yang diamankan melalui pengamanan sinyal dan menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) berdasarkan PHKS	sistem/kegiatan	24	Rp.394.827.000	6	Rp.98.295.000	
2.1.4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sertifikat elektronik yang diterbitkan untuk pengamanan informasi daerah	Sertifikat elektronik	28	Rp.49.678.850	7	Rp.10.480.000	
2.2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan pola hubungan komunikasi sandi	OPD	15	Rp.32.999.000	0	Rp -	
2.2.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jangka waktu Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	Rp.32.999.000	0	Rp -	
3	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	persen	95	Rp.4.784.149.445	89,44	Rp.947.231.255	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
3.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah informasi publik pemerintah daerah yang dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat	informasi	15	Rp.4.784.149.445	12	Rp.947.231.255	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024		Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
				Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	
3.1.1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Laporan Monitoring Opini dan Aspirasi	Dokumen	12	Rp.577.243.500	0	Rp -	
3.1.2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan strategi komunikasi	konten	15	Rp.1.622.478.940	12	Rp.348.508.100	
3.1.3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi	kali / media	17	Rp .520.772.000	4	Rp.118.200.000	
3.1.4	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah pengaduan masyarakat yang diverifikasi	pengaduan	556	Rp.526.086.000	480	Rp.121.660.000	
3.1.5	Layanan Hubungan Media	Jumlah siaran pers yang dilakukan	kali	23	Rp.592.340.500	20	Rp.131.745.000	
3.1.6	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	jumlah komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi kebijakan pemerintah	komunitas	26	Rp.442.506.155	6	Rp.106.518.155	
3.1.7	Manajemen Komunikasi Krisis	jumlah dokumen laporan pengelolaan komunikasi krisis Kota Pontianak	dokumen	5	Rp.164.639.350	2	Rp.40.600.000	
3.1.8	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah informasi dan dokumentasi yang disampaikan melalui media PPID	informasi	55	Rp.338.083.000	40	Rp.80.000.000	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Presentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik Sektoral Kota Pontianak	persen	98	Rp.2.859.064.075	90	Rp.559.700.000	Bidang Statistik Sektoral

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024		Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
				Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	
4.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah data statistik sektoral di Kota Pontianak yang terbaru/terupdate	data	2000	Rp.2.859.064.075	1500	Rp.559.700.000	
4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral dan pelaksanaan Forum Data Kota Pontianak	Kali	4	Rp.682.202.800	4	Rp.114.820.000	
4.1.2	Peningkatan Kapasitas SDM PEMDA dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah bimtek, sosialisasi dan pendampingan pengumpulan data statistik sektoral yang diselenggarakan	kali	2	Rp.202.823.000	2	Rp.46.810.000	
4.1.3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Buku Metadata kegiatan statistik sektoral dan Buku Metadata Satu Data	buku	100	Rp.177.138.400	100	Rp.41.810.000	
4.1.4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Buku Updating Data Statistik Sektoral, Buku Data Dinamis dan Buku Kota Pontianak Dalam Angka	buku	250	Rp.384.420.000	250	Rp.71.690.000	
4.1.5	Pengembangan Infrastruktur	jumlah infrastruktur statistik sektoral yang dikembangkan	Unit	1	Rp.29.023.375	0	Rp -	
4.1.6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	1) Jumlah Buku Profil Daerah;	buku	175	Rp.1.383.456.500	130	Rp.284.570.000	
		2) Jumlah Data yang sudah terintegrasi pada portal satu data Kota Pontianak;	data	2000	Rp -	1500		
		3) Jumlah Expose Data Statistik Sektoral	dokumen	150	Rp -	30		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024		Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
				Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	persen	100	Rp. 9.137.711.784	92	Rp.1.661.592.395	Sekretariat
5.1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	22	Rp.144.413.750	22	Rp.26.140.000	
5.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	7	Rp.15.634.700	7	Rp.3.222.000	
5.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA SKPD yang disusun	Sub Kegiatan	60	Rp.15.634.700	54	Rp.3.222.000	
5.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah sub kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	Sub Kegiatan	20	Rp.15.634.700	20	Rp.3.222.000	
5.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah kegiatan pada dokumen DPA SKPD yang disusun	Kegiatan	13	Rp.15.634.700	12	Rp.3.222.000	
5.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	Kegiatan	9	Rp.15.634.700	10	Rp.3.222.000	
5.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Laporan	5	Rp.30.659.750	5	Rp.5.500.000	
5.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	6	Rp.35.580.500	6	Rp.4.530.000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024		Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
				Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	
5.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	bulan	12	Rp.2.548.778.572	12	Rp.517.734.295	Sekretariat
5.2.1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jangka waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	bulan	12	Rp.1.402.555.659	12	Rp.304.114.295	
5.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	bulan	12	Rp.1.085.139.413	12	Rp.200.700.000	
5.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jangka waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD	bulan	12	Rp.9.227.000	12	Rp.2.040.000	
5.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	4	Rp.5.494.500	1	Rp.1.000.000	
5.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	laporan	12	Rp.46.362.000	12	Rp.9.880.000	
5.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	bulan	12	Rp.421.741.150	12	Rp.90.700.000	Sekretariat
5.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	stel	83	Rp.226.961.150	81	Rp.50.700.000	
5.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	orang	4	Rp.179.780.000	4	Rp.40.000.000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024		Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
				Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	
5.3.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	kali	4	Rp.49.350.000	0	Rp -	
5.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu pelayanan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	Rp.1.386.481.400	12	Rp.288.946.000	Sekretariat
5.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bulan	12	Rp.49.785.800	12	Rp.10.056.000	
5.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	0	Rp.5.250.000	0	Rp -	
5.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan	Unit	0	Rp.5.750.000	0	Rp -	
5.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	bulan	12	Rp.860.411.800	12	Rp.181.590.000	
5.4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	Rp.265.139.900	12	Rp.55.100.000	
5.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	Rp.55.919.900	12	Rp.10.200.000	
5.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	bulan	12	Rp.144.224.000	12	Rp.32.000.000	
5.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	50	Rp.2.978.608.100	65	Rp.406.592.100	Sekretariat

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024		Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
				Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	
5.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	unit	1	Rp.200.000.000	0	Rp -	
5.5.2	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel	unit	63	Rp.259.600.000	33	Rp.69.940.000	
5.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	unit	48	Rp.2.403.480.750	30	Rp.324.102.750	
5.5.4	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit pengadaan aset tetap tak berwujud	unit	25	Rp.115.527.350	2	Rp.12.549.350	
5.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	bulan	12	Rp.1.206.070.812	12	Rp.234.480.000	Sekretariat
5.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	Rp.52.534.500	12	Rp.10.000.000	
5.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	bulan	12	Rp.641.167.040	12	Rp.126.720.000	
5.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	bulan	12	Rp.512.369.272	12	Rp.97.760.000	
5.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Unit	212	Rp.451.618.000	68	Rp.97.000.000	Sekretariat
5.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	unit	2	Rp.197.585.500	2	Rp.39.000.000	
5.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	203	Rp.232.060.000	65	Rp.53.000.000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024		Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
				Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	
5.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	Rp.21.972.500	1	Rp.5.000.000	
Jumlah					Rp.29.898.676.351		Rp.5.902.400.000	

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, sebagai dokumen perencanaan yang berisikan program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan yaitu tahun anggaran 2021, dengan demikian Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak merupakan dokumen perencanaan satu tahunan.

Tujuan penyusunan Rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2020 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan RKT dan KUA PPAS demi lancarnya pelaksanaan program yang akan ditetapkan dalam KUA PPAS, RKPd Kota Pontianak Tahun 2021 yang telah sesuai dengan potensi yang tersedia, dengan tujuan antara lain :

1. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 1 (satu) tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak untuk mengakomodir Visi, Misi, Program dan Sasaran Walikota Pontianak yang telah ditetapkan yang disinergikan dengan Visi dan Misi Organisasi.
2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021.

Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra-OPD) adalah Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD yang harus mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd) dan untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra-OPD dan Renja, RKT OPD, maka dokumen Renja, RKT OPD haruslah mempunyai keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra-OPD tersebut seperti isu-isu strategis, Visi, Misi, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan sasarannya sedangkan program OPD haruslah berpedoman pada rumusan program RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada Renja dan RKT OPD harus juga berpedoman pada indikasi kegiatan Renstra-OPD dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPd.

Adapun manfaat Renja dalam pengelolaan organisasi perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yaitu :

1. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana perencanaan strategik akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.
2. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan tahun 2021.
3. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021.

LAMPIRAN

RENCANA KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2020-2024

Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										KONDISI AKHIR	Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab	
				2020		2021		2022		2023		2024				
				Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)			
I	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	Persen	88	Rp2.971.981.930	91	Rp 3.647.150.040	94	Rp 2.409.849.400	97	Rp 2.517.395.700	100	Rp 2.524.924.085	100%	
1.1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya pengelolaan domain dan sub domain dalam jaringan intra pemerintah daerah	Jumlah domain pemerintah pusat dan sub domain pemerintah daerah yang dikelola dan terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah daerah	Domain / Sub Domain	163	Rp437.940.000	65	Rp 1.241.870.627	29	Rp 273.600.000	31	Rp 313.858.000	50	Rp 313.545.308	175	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
1.1.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya pengelolaan dan pengawasan nama domain dan subdomain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Jumlah domain / sub domain pemerintah daerah yang dikelola	domain / sub domain	163	Rp -	65	Rp 229.531.990	29	Rp 120.600.000	29	Rp 133.482.000	44	Rp 133.349.406	175	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
1.1.2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang sudah terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	OPD	2 OPD	Rp437.940.000	5	Rp 1.012.338.637	5	Rp 153.000.000	5	Rp 180.376.000	10	Rp 180.195.902	25	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
1.2	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Terintegrasinya layanan publik dan administrasi yang di Pemerintah Kota Pontianak	Jumlah layanan publik dan administrasi yang terintegrasi	Aplikasi / Layanan Publik	2	Rp2.534.041.930	2	Rp 2.405.279.413	2	Rp 2.136.249.400	2	Rp 2.203.537.700	2	Rp 2.211.378.777	8	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
1.2.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah pelaksanaan pengawasan e-government	kali	1	Rp7.010.000	1	Rp 54.059.000	1	Rp 56.761.950	1	Rp 61.870.526	1	Rp 68.676.283	1	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
1.2.2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengelolaan pusat data pemerintah daerah	jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah dan Jumlah perangkat daerah yang	OPD	30	Rp2.024.833.930	30	Rp 1.510.144.925,00	30	Rp 1.320.587.450	30	Rp 1.347.058.674	30	Rp 1.340.063.892	30	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika

Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										KONDISI AKHIR	Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab	
				2020		2021		2022		2023		2024				
				Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)			
		menyimpan data di pusat data pemerintah														
1.2.3	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya pengembangan aplikasi dan proses bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi/Sistem elektronik yang dikembangkan dan sesuai dengan peraturan	Aplikasi	2	Rp158.430.000	3	Rp 291.080.000	3	Rp 200.000.000	3	Rp 203.612.000	4	Rp 206.204.384	13	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
1.2.4	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Terelenggaranya sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah Aplikasi / Sistem penghubung Layanan Pemerintah	Aplikasi	0	Rp -	1	Rp 68.839.800	1	Rp 65.000.000	1	Rp 70.909.000	1	Rp 73.198.778	1	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
1.2.5	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas dan kota cerdas	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Program Kegiatan terkait pelaksanaan Smart City	OPD	0	Rp343.768.000	24	Rp 385.153.350	25	Rp 400.000.000	27	Rp 420.437.000	30	Rp 420.017.255	30	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
1.2.6	Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	sistem	0	Rp -	5	Rp 10.000.000	5	Rp 10.500.000	5	Rp 11.445.000	5	Rp 12.703.950	5	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
1.2.7	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi SPBE	laporan		Rp -	1	Rp 86.002.338	1	Rp 83.400.000	1	Rp 88.205.500	1	Rp 90.514.235	1	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah	Indeks			Cukup Baik	Rp 252.885.480	Baik	Rp 212.081.500	Baik	Rp 229.466.000	Sangat Baik	Rp 237.838.290	Sangat Baik	

Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										KONDISI AKHIR	Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
					2020		2021		2022		2023		2024			
					Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)		
2.1	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah area informasi yang telah diamankan dengan persandian	area	1	Rp6.140.000	1	Rp 252.885.480	1	Rp 202.081.500	1	Rp 218.566.000	1	Rp 225.739.290	4	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
2.1.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah	dokumen	1	Rp3.690.000	1	Rp 24.991.800	1	Rp 26.242.000	1	Rp 28.604.000	1	Rp 31.750.440	1	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
2.1.2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	jumlah sistem elektronik / sistem informasi yang telah diaudit dengan resiko rendah	sistem	6	Rp1.200.000	8	Rp 66.990.000	8	Rp 70.339.500	8	Rp 76.670.000	8	Rp 78.300.000	32	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
2.1.3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	jumlah aplikasi / sistem elektronik / kegiatan strategis non elektronik / titik komunikasi yang diamankan melalui pengamanan sinyal dan menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) berdasarkan PHKS	sistem/kegiatan	0	Rp -	6	Rp 99.003.680	6	Rp 94.000.000	6	Rp 100.757.000	6	Rp 101.775.000	24	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
2.1.4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Tersedianya layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota	Jumlah Sertifikat elektronik yang diterbitkan untuk pengamanan informasi daerah	Sertifikat elektronik	4	Rp1.250.000	7	Rp 61.900.000	7	Rp 11.500.000	7	Rp 12.535.000	7	Rp 13.913.850	28	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
2.2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan pola hubungan komunikasi sandi	OPD	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.900.000	1	Rp 12.099.000	15	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
2.2.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jangka waktu Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	bulan	0	Rp -	0	Rp -	12	Rp 10.000.000	12	Rp 10.900.000	12	Rp 12.099.000	12	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika

Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										KONDISI AKHIR	Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab	
				2020		2021		2022		2023		2024				
				Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)			
3	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya penyebaran informasi publik kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	persen			89,44	Rp 1.045.675.814	90	Rp 1.107.148.800	92	Rp 1.184.040.140	95	Rp 1.170.499.250	95	
3.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah informasi publik pemerintah daerah yang dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat	informasi	498	Rp471.041.900	12	Rp 1.045.675.814	13	Rp 1.107.148.800	14	Rp 1.184.040.140	15	Rp 1.170.499.250	15	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
3.1.1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya pengelolaan monitoring opini dan aspirasi publik	Jumlah Laporan Monitoring Opini dan Aspirasi	Dokumen	0	Rp -	0	Rp -	12	Rp 188.839.500	12	Rp 197.652.000	12	Rp 190.752.000	12	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
3.1.2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Jumlah Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan strategi komunikasi	konten	12	Rp244.869.900	12	Rp 428.365.500	13	Rp 333.544.300	14	Rp 358.699.640	15	Rp 337.668.900	15	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
3.1.3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi	kali / media	1	Rp17.650.000	4	Rp 148.023.920	4	Rp 115.422.000	4	Rp 130.500.000	4	Rp 139.000.000	17	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
3.1.4	Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya pelayanan informasi publik	Jumlah pengaduan masyarakat yang diverifikasi	pengaduan	480	Rp31.724.000	480	Rp 114.189.850	504	Rp 119.358.000	529	Rp 126.327.000	556	Rp 127.017.000	556	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
3.1.5	Layanan Hubungan Media	Terselenggaranya layanan hubungan media	Jumlah siaran pers yang dilakukan	kali	4	Rp158.800.000	20	Rp 109.980.500	21	Rp 128.429.000	22	Rp 135.300.500	23	Rp 133.066.000	23	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
3.1.6	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terselenggaranya kemitraan dengan pemangku kepentingan	jumlah komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi kebijakan pemerintah	komunitas	1	Rp6.500.000	6	Rp 125.528.145	6	Rp 103.642.000	6	Rp 107.036.000	7	Rp 118.810.000	26	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
3.1.7	Manajemen Komunikasi Krisis	Terselenggaranya manajemen komunikasi krisis pemerintah daerah	jumlah dokumen laporan pengelolaan komunikasi krisis Kota Pontianak	dokumen	0	Rp -	2	Rp 40.295.999	3	Rp 40.074.000	4	Rp 43.680.000	5	Rp 40.285.350	5	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										KONDISI AKHIR	Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
					2020		2021		2022		2023		2024			
					Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)		
3.1.8	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terlaksananya penguatan tata kelola komisi informasi di daerah	Jumlah informasi dan dokumentasi yang disampaikan melalui media PPID	informasi	0	Rp11.498.000	40	Rp 79.291.900	45	Rp 77.840.000	50	Rp 84.845.000	55	Rp 83.900.000	55	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Meningkatnya keterseleenggaraan statistik sektoral Kota Pontianak	Presentase Tingkat terseleenggaranya kegiatan Statistik Sektoral Kota Pontianak	persen			90	Rp 559.708.964	92	Rp 548.468.500	95	Rp 601.717.200	98	Rp 634.773.375	98	
4.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Terseleenggaranya Statistik Sektoral di Kota Pontianak	Jumlah data statistik sektoral di Kota Pontianak yang terbaru/terupdate	data	15000	Rp514.405.000	1500	Rp 559.708.964	1650	Rp 548.468.500	1800	Rp 601.717.200	2000	Rp 634.773.375	2000	Bidang Statistik Sektoral
4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral dan pelaksanaan Forum Data Kota Pontianak	Kali	2	Rp216.560.000	4	Rp 130.772.845	4	Rp 110.920.000	4	Rp 120.902.800	4	Rp 119.000.000	4	Bidang Statistik Sektoral
4.1.2	Peningkatan Kapasitas SDM PEMDA dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Terlaksananya peningkatan Kapasitas SDM PEMDA dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah bimtek, sosialisasi dan pendampingan pengumpulan data statistik sektoral yang diselenggarakan	kali	0	Rp5.500.000	2	Rp 30.808.936	2	Rp 45.700.000	2	Rp 49.813.000	2	Rp 55.000.000	2	Bidang Statistik Sektoral
4.1.3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tersedianya Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Buku Metadata kegiatan statistik sektoral dan Buku Metadata Satu Data	buku	0	Rp -	100	Rp 41.850.000	100	Rp 40.827.000	100	Rp 44.501.400	100	Rp 50.000.000	100	Bidang Statistik Sektoral
4.1.4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	Jumlah Buku Updating Data Statistik Sektoral, Buku Data Dinamis dan Buku Kota Pontianak Dalam Angka	buku	1	Rp89.080.000	250	Rp 71.690.000	250	Rp 70.000.000	250	Rp 76.300.000	100	Rp 77.350.000	250	Bidang Statistik Sektoral
4.1.5	Pengembangan Infrastruktur	Terlaksananya pengembangan infrastruktur statistik sektoral	jumlah infrastruktur statistik sektoral yang dikembangkan	Unit	0	Rp500.000	0	Rp -	0	Rp -			1	Rp 28.523.375	1	Bidang Statistik Sektoral
4.1.6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terseleenggaranya otorisasi statistik sektoral di daerah	1) Jumlah Buku Profil Daerah;	buku	50	Rp202.765.000	130	Rp 284.587.183	140	Rp 281.021.500	150	Rp 310.200.000	175	Rp 304.900.000	175	Bidang Statistik

Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										KONDISI AKHIR	Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)		
		2) Jumlah Data yang sudah terintegrasi pada portal satu data Kota Pontianak;	data	15.000		1500		1650	Rp -	1800		2000		2000	Sektoral
		3) Jumlah Expose Data Statistik Sektoral	dokumen	5		30		30	Rp -		Rp -			382	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	persen			92	Rp 6.874.380.412	94	Rp 6.970.971.800	96	Rp 7.335.652.960	100	Rp 8.166.964.200	100	
5.1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	12	Rp28.310.000	22	Rp 32.856.230	22	Rp 34.499.042	22	Rp 27.659.074	22	Rp 32.600.000	22	Sekretariat
5.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	6	Rp1.342.000	7	Rp 10.099.010	7	Rp 10.603.961	7	Rp 3.687.600	7	Rp 4.000.000	7	Sekretariat
5.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen rencana kerja dan anggaran perangkat daerah	Sub Kegiatan	5	Rp1.342.000	54	Rp 3.800.000	60	Rp 3.990.000	60	Rp 3.687.600	60	Rp 4.000.000	60	Sekretariat
5.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perubahan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah	Sub Kegiatan	20	Rp1.342.000	20	Rp 4.300.000	20	Rp 4.515.000	20	Rp 3.687.600	20	Rp 4.000.000	20	Sekretariat
5.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah	Kegiatan	12	Rp1.342.000	12	Rp 3.300.000	13	Rp 3.465.000	13	Rp 3.687.600	13	Rp 4.000.000	13	Sekretariat
5.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen perubahan pelaksanaan anggaran perangkat daerah	Kegiatan	10	Rp1.342.000	10	Rp 2.300.000	9	Rp 2.415.000	9	Rp 3.687.600	9	Rp 4.000.000	9	Sekretariat
5.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	1	Rp6.190.000	5	Rp 3.527.369	5	Rp 3.703.737	5	Rp 4.037.074	5	Rp 6.900.000	5	Sekretariat
5.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	6	Rp15.410.000	6	Rp 5.529.851	6	Rp 5.806.344	6	Rp 5.184.000	6	Rp 5.700.000	6	Sekretariat
5.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan	12	Rp4.937.952.738	12	Rp 5.533.783.576	12	Rp 5.841.146.455	12	Rp 6.239.397.633	12	Rp 6.922.676.183	12	Sekretariat

Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										KONDISI AKHIR	Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab	
				2020		2021		2022		2023		2024				
				Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)			
5.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN perangkat daerah	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	bulan	12	Rp4.507.877.374	12	Rp 4.923.085.946	12	Rp 5.169.240.243	12	Rp 5.634.471.865	12	Rp 6.254.263.770	12	Sekretariat
5.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya akuntansi dan pelaporan keuangan perangkat daerah	Jangka waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	bulan	12	Rp28.000.000	12	Rp 274.910.762	12	Rp 319.330.000	12	Rp 358.034.000	12	Rp 397.400.000	12	Sekretariat
5.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	bulan	12	Rp399.275.364	12	Rp 316.620.000	12	Rp 332.451.000	12	Rp 229.702.000	12	Rp 254.002.413	12	
5.2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terselenggaranya koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jangka waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD	bulan	0	Rp -	12	Rp 5.180.000	12	Rp 5.439.000	12	Rp 2.335.000	12	Rp 2.710.000	12	
5.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	Rp1.000.000	1	Rp 3.098.967	1	Rp 3.253.915	1	Rp 3.546.768	1	Rp 1.300.000	4	
5.2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	laporan	12	Rp1.800.000	12	Rp 10.887.901	12	Rp 11.432.296	12	Rp 11.308.000	12	Rp 13.000.000	12	Sekretariat
5.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		bulan	0	Rp -	12	Rp 100.680.000	12	Rp 118.214.000	12	Rp 112.503.260	12	Rp 117.000.000	12	Sekretariat
5.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	stel	0	Rp -	81	Rp 70.680.000	83	Rp 72.214.000	83	Rp 78.713.260	83	Rp 65.000.000	83	Sekretariat
5.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	orang	0	Rp -	4	Rp 30.000.000	4	Rp 31.000.000	4	Rp 33.790.000	4	Rp 52.000.000	4	
5.3.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	kali	0	Rp -	0	Rp -	3	Rp 15.000.000	3	Rp 16.350.000	4	Rp 18.000.000	4	
5.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah		bulan	12	Rp112.485.314	12	Rp 319.978.654	12	Rp 273.424.114	12	Rp 328.197.190	12	Rp 399.813.000	12	Sekretariat
5.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jangka waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bulan	12	Rp5.000.000	12	Rp 10.137.061	12	Rp 10.643.914	12	Rp 11.510.000	12	Rp 12.661.000	12	Sekretariat
5.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 1.000.000	1	Rp 1.250.000	2	Rp 3.000.000	0	

Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										KONDISI AKHIR	Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab	
				2020		2021		2022		2023		2024				
				Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)			
5.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan	Unit	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 1.250.000	1	Rp 1.500.000	2	Rp 3.000.000	0	
5.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	bulan	0	Rp74.549.414	12	Rp 224.940.346	12	Rp 154.000.000	12	Rp 197.819.272	12	Rp 255.752.000	12	
5.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Jangka waktu penyediaan barang cetak dan penggandaan	bulan	12	Rp22.999.900	12	Rp 36.777.247	12	Rp 56.000.000	12	Rp 61.040.000	12	Rp 70.000.000	12	
5.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	Rp9.936.000	12	Rp 10.200.000	12	Rp 10.710.000	12	Rp 11.673.900	12	Rp 13.400.000	12	
5.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	bulan	0	Rp -	12	Rp 37.924.000	12	Rp 39.820.200	12	Rp 43.404.018	12	Rp 42.000.000	12	
5.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	30	Rp1.889.670.000	65	Rp 510.864.452	75	Rp 314.022.315	85	Rp 205.660.000	90	Rp 274.800.000	50	Sekretariat
5.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	unit	0		0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 200.000.000	1	
5.5.2	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel kantor	Jumlah unit pengadaan mebel	unit	1	Rp43.860.000	33	Rp 106.705.781	10	Rp 74.000.000	10	Rp 80.660.000	10	Rp 25.000.000	48	
5.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	unit	29	Rp1.845.810.000	30	Rp 362.243.921	10	Rp 226.844.315	5	Rp 50.000.000	3	Rp 35.000.000	25	
5.5.4	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya aset tak berwujud	Jumlah unit pengadaan aset tetap tak berwujud	unit	0	Rp -	2	Rp 41.914.750	10	Rp 13.178.000	10	Rp 75.000.000	3	Rp 14.800.000	48	
5.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	bulan	12	Rp200.800.000	12	Rp 160.596.000	12	Rp 168.625.800	12	Rp 183.802.122	12	Rp 304.075.016	12	Sekretariat
5.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya layanan jasa surat menyurat	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	Rp8.000.000	12	Rp 12.500.000	12	Rp 13.125.000	12	Rp 14.306.250	12	Rp 15.736.875	12	
5.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik kantor	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	bulan	12	Rp81.360.000	12	Rp 56.207.600	12	Rp 59.017.980	12	Rp 64.329.598	12	Rp 172.655.240	12	
5.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	bulan	12	Rp111.440.000	12	Rp 91.888.400	12	Rp 96.482.820	12	Rp 105.166.274	12	Rp 115.682.901	12	

Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										KONDISI AKHIR	Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab	
				2020		2021		2022		2023		2024				
				Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)			
5.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Unit	23	Rp143.400.000	68	Rp 215.621.500	69	Rp 221.040.075	71	Rp 238.433.682	73	Rp 116.000.000	6	Sekretariat
5.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	unit	2	Rp28.000.000	2	Rp 39.532.000	2	Rp 41.508.600	2	Rp 45.244.374	2	Rp 45.000.000	2	
5.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	20	Rp12.060.000	65	Rp 52.250.000	66	Rp 50.000.000	68	Rp 52.000.000	70	Rp 65.000.000	3	
5.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	Rp103.340.000	1	Rp 123.839.500	1	Rp 129.531.475	1	Rp 141.189.308	1	Rp 6.000.000	1	
						Rp 11.276.186.882		Rp 12.379.800.710		Rp 11.248.520.000		Rp 11.868.272.000		Rp 12.734.999.200		



RENCANA KERJA (RENJA)

2021